

PENTINGNYA KONSELING PENDIDIKAN BAGI ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

Kholifatul Herliyana¹, Bayuda Luqman Al Farisi², Kholifatul Sa'diyah³, Zainollah⁴,
Ansharul Fuqaha⁵, Nur Ummi Fatayati⁶, Kholis⁷, Musbahul Munir⁸.

¹²³⁴⁵⁶Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura

⁷University Sultan Zainal Abidin Malaysia, ⁸University Tenaga Nasional Malaysia

Email: : ¹ghembhuleel@gmail.com, ²biobayy@gmail.com ³khalifatusjunaidi@gmail.com,
⁴zainollah2014@gmail.com, ⁵ansharulofficial@gmail.com, ⁶nurummifatayati@gmail.com,
⁷kholisfrendika16@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji secara kritis urgensi layanan konseling pendidikan sebagai instrumen pendukung adaptasi akademik, sosial, dan emosional anak pekerja migran indonesia di Malaysia, sekaligus memetakan tantangan implementasinya. Kajian disusun melalui pendekatan tinjauan literatur naratif (narrative literature review) dengan menelaah laporan kebijakan, artikel jurnal terindeks, dan dokumen resmi lembaga internasional yang terbit dari tahun 2020 hingga 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling di Malaysia, meskipun telah memiliki kerangka kelembagaan yang cukup mapan melalui peran Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK), masih berorientasi pada populasi peserta didik warga negara Malaysia sehingga belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan multikultural anak pekerja migran indonesi di malaysia, terutama kelompok anak pengungsi dan anak pekerja migran tak berdokumen yang bahkan kerap tidak dapat mengakses sekolah formal sama sekali.

Kata Kunci konseling pendidikan; anak pekerja migran, multikultural; adaptasi sekolah; Malaysia

Abstract

This article aims to examine the urgency of educational counseling services as a strategic instrument to support the academic, social, and emotional adaptation of CIMWs in Malaysia while identifying the challenges associated with their implementation. The study employed a narrative literature review by analyzing indexed journal articles, policy reports, and official documents published by international organizations between 2020 and 2025. The findings indicate that Malaysia has established a relatively strong institutional framework for guidance and counseling through the role of Guidance and Counseling Teachers (Guru Bimbingan dan Kaunseling/GBK). However, these services remain primarily oriented toward Malaysian citizens and have not yet fully addressed the diverse needs of CIMWs, particularly undocumented migrant children and refugee children who often experience limited or no access to formal education.

Keywords: educational counseling; children of Indonesian migrant workers; multiculturalism; school adaptation; Malaysia.

A. PENDAHULUAN

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan migrasi terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik bagi pekerja migran dari negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Myanmar, maupun bagi ekspatriat profesional, pelajar internasional, serta populasi pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Rohingya, Suriah, Yaman, hingga Somalia. Keberagaman latar belakang migrasi ini melahirkan satu kelompok penduduk yang sering luput dari perhatian kebijakan pendidikan nasional, yaitu anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang tumbuh dan bersekolah—atau justru tidak dapat bersekolah—di wilayah Malaysia. Data terbaru dari UNICEF Malaysia mengungkapkan bahwa dari sekitar 41.000 anak pengungsi usia sekolah yang terdaftar pada UNHCR di Malaysia, tidak satu pun di antaranya memperoleh akses pendidikan formal, sementara hanya sekitar 34 persen yang dapat mengikuti pendidikan informal melalui pusat

pembelajaran alternatif¹ oleh kenyataan bahwa lebih dari seribu empat ratus anak tercatat pernah ditahan di pusat tahanan imigrasi, sebuah realitas yang jauh dari prinsip perlindungan anak yang seharusnya menjadi pijakan sistem pendidikan².

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Kajian yang dilakukan Loganathan dkk.³ melalui wawancara mendalam terhadap para pemangku kepentingan pendidikan non-warga negara di Malaysia menemukan bahwa kebijakan "Zero Reject Policy" hanya membuka akses sekolah negeri bagi anak tanpa dokumen yang memiliki orang tua berkewarganegaraan Malaysia, sementara mayoritas anak migran dan anak tanpa kewarganegaraan lainnya bergantung sepenuhnya

¹UNICEF Malaysia, "World Refugee Day: UNICEF's Statement on Access to Education for Refugee and Stateless Children," 2024, <https://malaysia.un.org/en/272114-worldrefugeeday-unicef%E2%80%99s-statement-access-education-refugee-and-stateless-children>.

²Ibid.

³T.Loganathan dkk., "Undocumented: An Examination of Legal Identity and Education Provision for Children in Malaysia," PLOS ONE 17, no. 2 (2022): hlm. e0263404, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263404>.

pada pusat pembelajaran komunitas yang umumnya tidak terakreditasi secara formal. Dalam konteks anak pekerja migran Indonesia, Yulianto dkk.⁴ mencatat bahwa hak pendidikan anak-anak tersebut kerap terabaikan, terutama bagi anak dari pekerja migran tidak berdokumen, sehingga peran lembaga pembelajaran nonformal seperti pusat bimbingan belajar komunitas menjadi tumpuan utama, misalnya yang terlihat pada praktik di kawasan Gombak, Selangor. Sementara itu, pada kutub yang berbeda, anak-anak ekspatriat dan pelajar internasional yang bersekolah di institusi bertaraf internasional turut menghadapi tekanan psikologis tersendiri akibat mobilitas tinggi dan tuntutan adaptasi lintas budaya yang berulang, sebagaimana diuraikan dalam konsep "third culture kids" oleh Jones dkk.⁵. Keragaman

karakteristik anak pekerja migran Indonesia di Malaysia ini—mulai dari anak pengungsi, anak tanpa kewarganegaraan, hingga anak ekspatriat dan pelajar internasional—menegaskan bahwa persoalan pendidikan yang mereka hadapi bukan sekadar persoalan akses administratif semata, melainkan juga menyangkut dimensi psikososial yang mendalam: kecemasan akibat perpindahan, kehilangan jejaring sosial, benturan nilai budaya, hingga potensi diskriminasi dan perundungan di lingkungan sekolah. Dalam titik inilah konseling pendidikan semestinya berperan signifikan sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan psikologis anak dengan tuntutan adaptasi akademik dan sosial di lingkungan baru.

Namun demikian, kajian mengenai peran konseling pendidikan secara spesifik bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia masih tergolong terbatas. Sebagian besar literatur

⁴M. I. Yulianto dkk., "The Role of the Government of Indonesia in Fighting for Recognition and the Right to Education for Children of Indonesia Migrant Workers in Malaysia," *Jurnal Public Policy* 9, no. 3 (2023): hlm. 159–163, <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i3.7059>.

⁵E. E. Jones dkk., "Stress, Mental Health and Sociocultural Adjustment in Third Culture Kids: Exploring the Mediating Roles of

Resilience and Family Functioning," *Frontiers in Psychology* 14 (2023): hlm. 1093046, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1093046>.

yang tersedia cenderung terpisah menjadi dua arus yang jarang beririsan: pertama, kajian mengenai hambatan akses pendidikan anak migran dan pengungsi yang lebih menyoroti aspek kebijakan dan hukum⁶; dan kedua, kajian mengenai pengembangan kompetensi multikultural konselor sekolah yang umumnya dikembangkan dalam konteks negara-negara Barat⁷. Kesenjangan (research gap) inilah yang hendak dijembatani oleh artikel ini, yakni dengan menyintesis kedua arus kajian tersebut untuk merumuskan bagaimana layanan konseling pendidikan seharusnya dirancang

dan diperkuat agar benar-benar responsif terhadap kebutuhan multikultural anak pekerja migran Indonesia di Malaysia, sebuah konteks yang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan negara-negara penerima migran lainnya karena keragaman status legal populasi migran yang dilayaninya.

Urgensi kajian ini juga perlu dipahami dalam konteks tren migrasi global yang terus meningkat pasca pandemi COVID-19. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pandemi justru memperburuk kerentanan anak migran dan pengungsi dalam mengakses pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam kajian Loganathan dkk.⁸ yang secara khusus menyoroti bagaimana penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi menimbulkan disparitas akses yang semakin lebar bagi anak non-warga negara di Malaysia dibandingkan anak warga negara Malaysia. Ketimpangan yang terjadi selama masa krisis tersebut memperlihatkan betapa rentannya

⁶T. Loganathan dkk., "Education for Non-Citizen Children in Malaysia during the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study," PLOS ONE 16, no. 12 (2021): hlm. e0259546, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259546>; Loganathan dkk., "Undocumented," 2022, hlm. e0263404; T. Loganathan dkk., "Barriers and Facilitators to Education Access for Marginalised Non-Citizen Children in Malaysia: A Qualitative Study," PLOS ONE (2023), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286793>.

⁷C. R. Ridley dkk., "The Process Model of Multicultural Counseling Competence," *The Counseling Psychologist* 49, no. 4 (2021): hlm. 504–555, <https://doi.org/10.1177/0011000021992339>; D. Mollen dan C. R. Ridley, "Rethinking Multicultural Counseling Competence: An Introduction to the Major Contribution," *The Counseling Psychologist* 49, no. 4 (2021): hlm. 490–503, <https://doi.org/10.1177/0011000020986543>.

⁸ Loganathan dkk., "Education for Non-Citizen Children," 2021, hlm. e0259546.

posisi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia ketika sistem pendidikan menghadapi tekanan, dan hal ini semestinya menjadi peringatan penting bagi perumus kebijakan untuk membangun sistem dukungan psikososial dan konseling yang lebih tangguh serta inklusif ke depannya, bukan sekadar sistem yang berfungsi baik dalam kondisi normal semata.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk: (1) menguraikan konsep dan fungsi konseling pendidikan dalam konteks lingkungan sekolah yang multikultural; (2) memetakan karakteristik dan kondisi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia beserta permasalahan pendidikan yang mereka hadapi; (3) menganalisis peran strategis konseling pendidikan dalam mengatasi permasalahan tersebut; dan (4) merumuskan strategi penguatan layanan konseling pendidikan berbasis multikultural yang dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Malaysia, baik pada sekolah kebangsaan maupun sekolah internasional.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan tinjauan literatur naratif (*narrative literature review*) yang bertujuan mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu secara kritis dan tematik, bukan sekadar merangkum secara deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena topik konseling pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia bersifat interdisipliner, mencakup ranah psikologi pendidikan, kebijakan migrasi, dan studi multikultural, sehingga memerlukan sintesis lintas bidang yang tidak dapat dijangkau secara memadai oleh tinjauan sistematis tunggal yang lazimnya membatasi diri pada satu rumpun keilmuan.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari basis data akademik bereputasi, meliputi PLOS ONE, Frontiers, ScienceDirect, PubMed, serta laporan resmi lembaga internasional seperti UNICEF dan mitra risetnya. Kriteria inklusi sumber ditetapkan sebagai berikut: (1) publikasi terbit pada rentang tahun 2020 hingga 2025; (2) relevansi tematik terhadap

konseling pendidikan, migrasi anak, atau kompetensi multikultural konselor; dan (3) ketersediaan identitas penulis, tahun publikasi, serta tautan digital (DOI atau URL) yang dapat diverifikasi. Proses penelusuran dilakukan melalui pencarian kata kunci berlapis dalam bahasa Inggris dan Indonesia, meliputi antara lain "migrant children education Malaysia", "school counseling multicultural competence", "refugee children education access", "third culture kids adjustment", serta "guidance and counselling Malaysia policy".

Analisis data dilakukan melalui teknik pemetaan tematik (thematic mapping), di mana temuan dari masing-masing sumber dikelompokkan ke dalam tema besar: (1) konsep dan fungsi konseling pendidikan; (2) karakteristik dan kondisi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia; (3) permasalahan pendidikan yang dihadapi; (4) peran konseling dalam mengatasi permasalahan; (5) kolaborasi lintas pemangku kepentingan; (6) implementasi kebijakan di Malaysia;

dan (7) strategi penguatan layanan ke depan. Pengelompokan tematik ini kemudian dianalisis secara kritis dengan menghubungkan temuan empiris pada konteks global dengan kekhususan konteks Malaysia, sehingga diperoleh sintesis yang tidak sekadar deskriptif melainkan juga argumentatif dan aplikatif.

C. HASIL

Permasalahan Pendidikan yang Dihadapi Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

1. Hambatan Bahasa dan Komunikasi

Hambatan bahasa merupakan persoalan yang paling kerap muncul dalam berbagai kajian mengenai pendidikan anak migran secara global, dan Malaysia tidak terkecuali dari pola ini. Ketidakmampuan berkomunikasi dalam bahasa pengantar sekolah—baik bahasa Melayu di sekolah kebangsaan maupun bahasa Inggris di sekolah internasional—menyulitkan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk mengikuti pembelajaran secara

aktif, berpartisipasi dalam diskusi kelas, maupun membangun relasi sosial dengan teman sebaya. Kajian sistematis mengenai inklusi peserta didik migran mengonfirmasi bahwa diskriminasi berbasis bahasa kerap mendorong anak migran untuk menarik diri (self-isolate) guna menghindari mikroagresi dan bahkan kekerasan eksplisit yang mereka alami di lingkungan sekolah⁹. Sebagai respons, sebagian anak migran justru mencari ruang penerimaan melalui mata pelajaran yang menuntut kemampuan linguistik tinggi serta program pendampingan sebaya (mentoring), yang menunjukkan adanya strategi adaptasi aktif meskipun dalam keterbatasan struktural yang mereka hadapi.

2. Perbedaan Budaya dan Nilai Sosial

Selain hambatan bahasa, perbedaan nilai budaya turut menjadi sumber ketegangan

tersendiri. Anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang berasal dari latar belakang budaya berbeda dapat mengalami kesalahpahaman terkait norma perilaku, etika interaksi guru-murid, hingga ekspektasi akademik yang berbeda dari yang mereka kenal di negara asal. Ketegangan ini seringkali diperparah oleh kurangnya pemahaman pihak sekolah terhadap latar belakang budaya peserta didik migran, sehingga interaksi antara keluarga migran dan sekolah rentan menimbulkan konflik dan miskomunikasi¹⁰. Kesenjangan pemahaman lintas budaya ini bukan hanya menjadi beban bagi anak, melainkan juga bagi orang tua yang kerap merasa tidak dilibatkan secara setara dalam proses pendidikan anaknya.

3. Kesulitan Adaptasi terhadap Kurikulum dan Sistem Pembelajaran

⁹“Perceptions and Strategies for the Inclusion of Migrant Students: A Systematic Review,” ScienceDirect, 2026, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035526000716>.

¹⁰Z. Medarić, B. Gornik, dan M. Sedmak, “What about the Family? The Role and Meaning of Family in the Integration of Migrant Children: Evidence from Slovenian Schools,” *Frontiers in Education* 7 (2022): hlm. 1003759, <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1003759>.

Perbedaan sistem kurikulum antara negara asal dan Malaysia turut menghadirkan tantangan tersendiri, terutama bagi anak yang berpindah sekolah pada usia yang relatif lanjut sehingga harus menyesuaikan diri dengan standar kompetensi, metode evaluasi, dan gaya pengajaran yang berbeda dari yang pernah mereka alami sebelumnya. Bagi anak ekspatriat dan pelajar internasional yang berpindah sekolah secara berulang akibat mobilitas pekerjaan orang tua, tantangan ini bersifat kumulatif dan berulang, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai adaptasi anak-anak dengan mobilitas internasional tinggi¹¹. Ketidakstabilan lingkungan belajar semacam ini berpotensi mengganggu kesinambungan capaian akademik serta menimbulkan kebingungan identitas akademik pada diri anak.

4. Permasalahan Psikologis: Stres, Kecemasan, dan Krisis Identitas

Dimensi psikologis merupakan aspek yang paling mendasar namun kerap kurang mendapat perhatian memadai dalam wacana pendidikan anak migran. Jones dkk.¹² dalam kajian terhadap anak-anak dengan mobilitas internasional tinggi menemukan bahwa stres yang dirasakan (*perceived stress*) dan stres akulturatif (*acculturative stress*) berkontribusi signifikan terhadap gangguan kesehatan mental dan hambatan penyesuaian sosial-budaya, meskipun ketahanan (*resilience*) individu terbukti berperan sebagai faktor penyangga (*mediator*) yang mampu meredam dampak negatif stres tersebut terhadap kesehatan mental anak. Temuan ini memberikan implikasi penting: intervensi konseling yang berfokus pada penguatan resiliensi berpotensi lebih efektif dibandingkan sekadar berupaya menghilangkan sumber stres itu sendiri, mengingat perpindahan lintas negara adalah realitas yang

¹¹Jones dkk., "Stress, Mental Health," 2023, hlm. 1093046.

¹²Ibid.

sulit dihindari bagi kelompok anak ini.

Bagi anak pengungsi khususnya, tekanan psikologis kerap bersumber bukan hanya dari proses adaptasi di negara tujuan, melainkan juga dari pengalaman traumatis pra-migrasi yang belum terselesaikan. Ketiadaan status legal turut menambah lapisan kecemasan tersendiri, mengingat anak-anak tanpa status resmi berisiko mengalami penahanan dan ketidakpastian masa depan yang berkepanjangan¹³. Kombinasi antara trauma pra-migrasi, ketidakpastian legal, dan tekanan adaptasi budaya inilah yang menjadikan kebutuhan dukungan psikologis bagi anak pengungsi jauh lebih kompleks dibandingkan kelompok anak pekerja migran Indonesia di Malaysia lainnya.

Diskriminasi, Eksklusi Sosial, dan Perundungan (Bullying)

Perundungan dan diskriminasi merupakan risiko nyata yang dihadapi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia di berbagai belahan dunia, termasuk berpotensi terjadi pula di Malaysia mengingat

pola serupa yang teridentifikasi secara konsisten dalam literatur global. Kajian mengenai perundungan terhadap peserta didik pengungsi menegaskan bahwa kekerasan, pengucilan, dan sikap merendahkan dari teman sebaya kerap menciptakan iklim sekolah yang tidak ramah, yang pada gilirannya berdampak buruk baik terhadap kesehatan mental maupun kemajuan akademik peserta didik migran¹⁴. Perundungan berbasis identitas ini diperburuk oleh kesalahpahaman guru terhadap latar belakang budaya peserta didik migran, termasuk ekspektasi rendah yang secara tidak sadar diberikan kepada mereka¹⁵. Konsekuensi dari perundungan tidak berhenti pada aspek emosional semata, tetapi juga terbukti menurunkan prestasi akademik dan tingkat kehadiran di sekolah akibat stres dan kecemasan yang mengganggu konsentrasi belajar peserta didik¹⁶.

¹³UNICEF Malaysia, "World Refugee Day," 2024.

¹⁴U.S. Committee for Refugees and Immigrants (Refugees.org), "International Day Against Violence & Bullying at School," 2024, <https://refugees.org/international-day-against-violence-bullying-at-school/>.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

Peran Konseling Pendidikan dalam Mengatasi Permasalahan Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

1. Pendampingan Adaptasi Akademik

Konseling pendidikan berperan penting dalam membantu anak pekerja migran Indonesia di Malaysia menyesuaikan diri dengan kurikulum dan metode pembelajaran baru melalui asesmen kebutuhan belajar individual, penyusunan rencana intervensi akademik, serta pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan belajar peserta didik. Pendampingan ini idealnya tidak hanya berorientasi pada remediasi akademik semata, melainkan juga membantu peserta didik memahami perbedaan sistem penilaian dan ekspektasi belajar antara negara asal dan Malaysia, sehingga proses transisi tidak menimbulkan kebingungan atau rasa gagal yang tidak perlu.

2. Layanan Konseling Individual dan Kelompok

Layanan konseling individual memungkinkan konselor menggali secara mendalam persoalan spesifik yang dialami tiap anak pekerja migran Indonesia di Malaysia, mengingat keragaman latar belakang migrasi menuntut pendekatan yang bersifat personal dan tidak dapat digeneralisasi. Di sisi lain, layanan konseling kelompok memberikan ruang bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk saling berbagi pengalaman dengan sesama peserta didik yang menghadapi tantangan serupa, yang terbukti dapat menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) dan mengurangi perasaan terisolasi. Pendekatan kelompok berbasis pendampingan sebaya (peer mentoring) khususnya terbukti menjadi ruang penerimaan yang dicari secara aktif oleh anak migran sebagai respons atas pengalaman

diskriminasi yang mereka alami¹⁷.

3. Pengembangan Keterampilan Sosial dan Komunikasi Lintas Budaya

Selain intervensi klinis, konseling pendidikan juga berfungsi sebagai wahana pengembangan keterampilan sosial secara proaktif, termasuk kemampuan komunikasi lintas budaya, resolusi konflik, dan empati terhadap perbedaan. Program semacam ini idealnya tidak hanya menysasar anak pekerja migran Indonesia di Malaysia sebagai penerima layanan, melainkan juga melibatkan peserta didik lokal agar tercipta pemahaman dan penerimaan yang bersifat dua arah, bukan sekadar tuntutan sepihak bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk "menyesuaikan diri" dengan lingkungan baru.

4. Penguatan Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Psikologis

Mengingat tingginya risiko stres akulturatif dan gangguan kesehatan mental pada anak

pekerja migran Indonesia di Malaysia, konselor pendidikan perlu memiliki kapasitas untuk melakukan deteksi dini terhadap tanda-tanda kecemasan, depresi, atau krisis identitas, serta merujuk peserta didik pada layanan kesehatan mental yang lebih spesialisistik apabila diperlukan. Chow dkk.¹⁸ melalui uji coba modul pelatihan "MDAS" (Mental Health disorder, Developmental disorders, Attachment and Self-compassionate) di Malaysia menunjukkan bahwa peningkatan literasi kesehatan mental dan efikasi diri konseling pada konselor sekolah dapat dicapai melalui pelatihan terstruktur, sebuah temuan yang relevan diterapkan pula dalam konteks penguatan kapasitas konselor menangani anak pekerja migran Indonesia di Malaysia dengan kebutuhan psikologis kompleks.

¹⁷"Perceptions and Strategies for the Inclusion of Migrant Students," 2026.

¹⁸S. K. Chow dkk., "Strengthening the Mental Health Literacy and Self-Efficacy of School Counsellors Using 'MDAS' Module: A Pilot Project in Malaysia," SAGE Open Medicine (2024), <https://doi.org/10.1177/20556365241279331>.

Pencegahan Konflik serta Penyelesaian Masalah di Lingkungan Sekolah

Konseling pendidikan juga berperan dalam merancang program pencegahan perundungan dan konflik antarpeserta didik yang berbasis pada perbedaan latar belakang kebangsaan. Peran ini mencakup pelatihan kepekaan budaya bagi peserta didik lokal, penyusunan protokol penanganan kasus diskriminasi, serta fasilitasi mediasi konflik yang melibatkan pihak-pihak terkait secara adil. Tanpa mekanisme pencegahan yang terstruktur, risiko perundungan berbasis identitas kebangsaan akan terus berulang dan berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang menjadi korban.

Kolaborasi Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat

1. Peran Guru, Konselor, dan Kepala Sekolah

Efektivitas layanan konseling pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia sangat bergantung pada sinergi

antara konselor, guru kelas, dan kepala sekolah sebagai pemimpin institusi. Guru kelas berperan sebagai pihak yang paling sering berinteraksi langsung dengan peserta didik sehingga posisinya strategis dalam mendeteksi dini tanda-tanda kesulitan adaptasi, sementara kepala sekolah memiliki wewenang untuk memastikan tersedianya kebijakan dan sumber daya yang mendukung inklusi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia di tingkat institusi. Ooi, Wan Jaafar, dan Crosling¹⁹ menemukan bahwa dukungan supervisor serta akses terhadap pelatihan berkontribusi signifikan terhadap efikasi diri konselor sekolah di Malaysia, yang mengindikasikan bahwa keberhasilan layanan konseling multikultural juga sangat ditentukan oleh sejauh mana pihak manajemen sekolah menyediakan dukungan

¹⁹P. B. Ooi, W. M. Wan Jaafar, dan G. Crosling, "Malaysian School Counselor's Self-Efficacy: The Key Roles of Supervisor Support for Training, Mastery Experience, and Access to Training," *Frontiers in Psychology* 12 (2021): hlm. 749225, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.749225>.

struktural bagi pengembangan kompetensi konselornya.

2. Keterlibatan Orang Tua dalam Mendukung Perkembangan Anak

Keterlibatan orang tua migran dalam proses pendidikan anak kerap menghadapi hambatan tersendiri, mulai dari keterbatasan bahasa, ketidaktahuan terhadap sistem pendidikan setempat, hingga rasa tidak percaya diri berinteraksi dengan pihak sekolah. Medarić, Gornik, dan Sedmak²⁰ menegaskan bahwa keterampilan interpersonal dan profesional guru menjadi prediktor penting bagi terbangunnya kerja sama yang dipersepsikan baik oleh orang tua migran, sementara sikap menghakimi dari pihak sekolah justru dapat membuat orang tua migran merasa terintimidasi dan enggan terlibat. Sejalan dengan hal itu, Melnikova²¹ menemukan bahwa

keterlibatan orang tua migran, termasuk pada jenjang sekolah menengah, membutuhkan bentuk-bentuk kolaborasi baru yang lebih adaptif, mengingat pola keterlibatan konvensional seringkali tidak mengakomodasi keterbatasan kapital sosial dan budaya yang dimiliki keluarga migran. Konselor pendidikan dalam konteks ini dapat berperan sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara keluarga migran dan pihak sekolah, termasuk melalui pendampingan proses akulturasi orang tua itu sendiri.

3. Dukungan Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Organisasi Sosial

Di luar ranah sekolah, dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran yang tidak kalah penting. Laporan bersama IDEAS dan UNICEF Malaysia²² menegaskan

²⁰Medarić, Gornik, dan Sedmak, "What about the Family?," 2022, hlm. 1003759.

²¹J. Melnikova, "Migrant Parents at High School: Exploring New Opportunities for Involvement," *Frontiers in Education* 7 (2022):

hlm. 979399, <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.979399>.

²²Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) dan UNICEF Malaysia, "Left Far Behind: The Impact of COVID-19 on Access to Education and Healthcare for Refugee and Asylum-Seeking Children in Peninsular Malaysia," 2022,

urgensi perlindungan hak pendidikan dan kesehatan anak pengungsi dan pencari suaka, dengan merekomendasikan solusi berbasis bukti yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga internasional. Demikian pula, peran konsulat negara asal, sebagaimana terlihat pada dukungan Konsulat Indonesia terhadap pusat pembelajaran anak pekerja migran di Sabah²³, menunjukkan bahwa jejaring dukungan lintas negara dapat menjadi salah satu solusi praktis di tengah keterbatasan kebijakan domestik. Organisasi masyarakat sipil turut mengisi kekosongan layanan formal melalui penyelenggaraan pusat pembelajaran alternatif, meskipun keberlanjutan dan kualitasnya masih sangat bergantung pada ketersediaan pendanaan dan pengakuan resmi dari otoritas pendidikan setempat.

<https://www.unicef.org/malaysia/press-releases/ideas-unicef-refugee-asylum-seeking-childrens-rights>.

²³Loganathan dkk., "Undocumented," 2022, hlm. e0263404.

D. DISKUSI

Implementasi Konseling Pendidikan di Malaysia

Secara kelembagaan, layanan bimbingan dan konseling di Malaysia telah memiliki fondasi yang relatif mapan. Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK) merupakan personel tetap yang diwajibkan hadir di setiap sekolah berdasarkan arahan Kementerian Pendidikan Malaysia, dengan tanggung jawab mencakup pengembangan kepribadian, kedisiplinan, pendidikan karier, serta kesejahteraan psikososial peserta didik²⁴. Ooi, Wan Jaafar, dan Crosling²⁵ menegaskan bahwa peran GBK ini semakin terintegrasi ke dalam sistem pendidikan Malaysia, mencakup lima domain utama yaitu akademik, karier, kesejahteraan psikososial dan mental, manajemen pemangku kepentingan, serta kedisiplinan peserta didik.

²⁴Ministry of Education Malaysia, kerangka kebijakan bimbingan dan kaunseling, 2012, sebagaimana dikutip dalam Redalyc, t.t. (sumber sekunder; rujukan asli tidak tersedia dalam basis data yang ditelusuri penulis).

²⁵Ooi, Wan Jaafar, dan Crosling, "Malaysian School Counselor's Self-Efficacy," 2021, hlm. 749225.

Meskipun demikian, kerangka kebijakan yang ada belum secara eksplisit dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan multikultural anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kajian Lee, Zainudin, dan Kamarudin²⁶ mengenai kesiapan konselor sekolah di Malaysia terhadap layanan konseling jarak jauh berbasis teknologi (tele-mental health) menegaskan bahwa efikasi diri konseling berperan sebagai penyangga (mediator) penting antara efikasi diri komputer dan sikap konselor terhadap adopsi teknologi konseling, sebuah temuan yang relevan mengingat teknologi berpotensi menjadi solusi jangkauan layanan bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang tersebar di berbagai wilayah geografis dan pusat pembelajaran alternatif yang tidak selalu memiliki tenaga konselor tetap.

Pada praktiknya, terdapat perbedaan mencolok antara

implementasi layanan konseling di sekolah internasional dan sekolah kebangsaan. Sekolah internasional umumnya memiliki sumber daya lebih memadai untuk menyediakan layanan konseling yang responsif terhadap kebutuhan psikososial anak ekspatriat, termasuk dukungan terhadap fenomena "third culture kids"²⁷. Sebaliknya, pada sekolah kebangsaan dan terutama pada pusat pembelajaran alternatif yang menjadi tumpuan utama anak pengungsi dan anak pekerja migran, ketersediaan tenaga konselor terlatih jauh lebih terbatas, bahkan pada banyak kasus nyaris tidak ada sama sekali mengingat status pusat pembelajaran tersebut yang tidak diakui secara formal oleh negara²⁸.

Tantangan Implementasi Layanan Konseling bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Terdapat sejumlah tantangan struktural yang menghambat implementasi layanan konseling multikultural bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.

²⁶W. R. Lee, Z. N. Zainudin, dan E. M. E. Kamarudin, "Counselling Self-Efficacy as a Mediator between Computer Self-Efficacy and Attitudes toward Tele-Mental Health among School Counsellors in Malaysia," PLOS ONE (2025), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0335955>.

²⁷Jones dkk., "Stress, Mental Health," 2023, hlm. 1093046.

²⁸Loganathan dkk., "Barriers and Facilitators," 2023.

Pertama, keterbatasan status legal pusat pembelajaran alternatif menyebabkan layanan konseling formal tidak dapat menjangkau mayoritas anak pengungsi dan anak migran tanpa dokumen, karena institusi tersebut berada di luar cakupan kebijakan pendidikan nasional²⁹. Kedua, keterbatasan kompetensi lintas budaya konselor sekolah yang pada umumnya dilatih dalam kerangka budaya dominan Malaysia, sehingga belum tentu memiliki kepekaan memadai terhadap kekhususan budaya anak pekerja migran Indonesia di Malaysia dari berbagai negara asal yang berbeda³⁰. Ketiga, hambatan bahasa antara konselor dan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia itu sendiri, yang berpotensi mengurangi kedalaman dan efektivitas proses konseling apabila tidak diatasi melalui penerjemah atau materi konseling multibahasa. Keempat, keterbatasan sumber daya dan rasio konselor

terhadap peserta didik yang masih menjadi persoalan struktural dalam sistem pendidikan Malaysia secara umum, sehingga penambahan beban layanan bagi kelompok anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang membutuhkan pendekatan lebih intensif berpotensi memperberat kondisi yang sudah ada.

Strategi Penguatan Layanan Konseling Pendidikan

1. Pengembangan Konseling Berbasis Multikultural

Penguatan layanan konseling pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia memerlukan pergeseran paradigma dari model konseling yang bersifat universal menuju model yang secara eksplisit mengintegrasikan kompetensi multikultural sebagai elemen inti, bukan sekadar pelengkap. Model proses kompetensi konseling multikultural yang dikembangkan Ridley dkk.³¹ dapat diadaptasi ke dalam konteks sekolah Malaysia dengan menekankan penggabungan budaya klien

²⁹Loganathan dkk., "Undocumented," 2022, hlm. e0263404; Loganathan dkk., "Barriers and Facilitators," 2023.

³⁰Ridley dkk., "The Process Model," 2021, hlm. 504–555; Mollen dan Ridley, "Rethinking Multicultural Counseling Competence," 2021, hlm. 490–503.

³¹Ridley dkk., "The Process Model," 2021, hlm. 504–555.

secara mendalam pada setiap tahapan sesi konseling, mulai dari persiapan hingga pengakhiran sesi. Pendekatan ini menuntut konselor untuk secara aktif memahami latar belakang migrasi, sistem nilai, dan pengalaman traumatis yang mungkin melatarbelakangi kondisi psikologis anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang mereka layani.

2. Peningkatan Kompetensi Konselor dalam Menangani Keberagaman Budaya

Peningkatan kapasitas konselor perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan yang dirancang khusus untuk konteks keberagaman budaya migran, bukan sekadar pelatihan multikultural generik. Model pelatihan seperti modul MDAS yang dikembangkan Chow dkk.³² menunjukkan bahwa peningkatan literasi kesehatan mental dan efikasi diri konseling dapat dicapai melalui pelatihan terstruktur berbasis modul, sebuah pendekatan yang dapat

direplikasi dengan modifikasi konten khusus untuk isu-isu migrasi, trauma lintas budaya, dan hambatan bahasa. Ooi, Wan Jaafar, dan Crosling³³ turut menegaskan pentingnya dukungan supervisor dan akses pelatihan berkelanjutan sebagai faktor penentu keberhasilan pengembangan kompetensi konselor sekolah di Malaysia.

3. Pemanfaatan Teknologi dalam Layanan Konseling

Teknologi konseling jarak jauh (tele-mental health) berpotensi menjadi solusi strategis untuk menjangkau anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang tersebar di berbagai wilayah geografis, termasuk yang berada di pusat pembelajaran alternatif yang tidak memiliki tenaga konselor tetap. Lee, Zainudin, dan Kamarudin³⁴ menemukan bahwa efikasi diri konseling memediasi secara parsial hubungan antara efikasi diri komputer dan sikap konselor

³²Chow dkk., "Strengthening the Mental Health Literacy," 2024.

³³Ooi, Wan Jaafar, dan Crosling, "Malaysian School Counselor's Self-Efficacy," 2021, hlm. 749225.

³⁴Lee, Zainudin, dan Kamarudin, "Counselling Self-Efficacy," 2025.

terhadap adopsi tele-mental health di kalangan konselor sekolah Malaysia, yang mengindikasikan bahwa keberhasilan adopsi teknologi tidak semata bergantung pada kesiapan teknis, melainkan juga pada keyakinan diri konselor terhadap kemampuan konseling mereka sendiri. Pemanfaatan teknologi ini juga dapat diperluas dalam bentuk materi konseling multibahasa berbasis daring, aplikasi pemantauan kesejahteraan psikologis peserta didik, serta platform konsultasi jarak jauh yang menghubungkan pusat pembelajaran alternatif dengan tenaga konselor profesional yang tidak selalu dapat hadir secara fisik di lokasi tersebut.

4. Penguatan Kerja Sama Antarinstansi untuk Mendukung Kesejahteraan Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Mengingat kompleksitas persoalan yang melibatkan aspek legal, pendidikan, dan psikososial secara bersamaan, penguatan

layanan konseling pendidikan bagi anak WNA tidak dapat dilakukan oleh sektor pendidikan semata. Diperlukan kerja sama lintas kementerian yang melibatkan otoritas imigrasi, kementerian pendidikan, kementerian kesejahteraan sosial, serta lembaga internasional seperti UNHCR dan UNICEF, sebagaimana direkomendasikan dalam laporan bersama IDEAS dan UNICEF Malaysia³⁵. Kolaborasi ini idealnya juga melibatkan konsulat negara asal anak pekerja migran Indonesia di Malaysia, organisasi masyarakat sipil penyelenggara pusat pembelajaran alternatif, serta komunitas migran itu sendiri, guna memastikan bahwa layanan konseling yang dirancang benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar kebijakan yang dirumuskan secara top-down tanpa melibatkan suara kelompok yang dituju.

³⁵IDEAS dan UNICEF Malaysia, "Left Far Behind," 2022.

5. Implikasi terhadap Perkembangan Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Ketersediaan layanan konseling pendidikan yang responsif secara multikultural memiliki implikasi luas terhadap perkembangan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia secara menyeluruh. Pada ranah akademik, pendampingan konseling yang tepat berpotensi mengurangi risiko putus sekolah dan meningkatkan keterlibatan belajar, mengingat salah satu penyebab utama putus sekolah pada anak migran adalah kombinasi antara tekanan psikologis dan hambatan struktural yang tidak tertangani secara memadai³⁶ (Loganathan dkk., 2023). Pada ranah sosial, program pengembangan keterampilan komunikasi lintas budaya dan pendampingan sebaya terbukti membuka ruang penerimaan yang secara aktif dicari oleh anak migran sebagai respons atas pengalaman

eksklusi yang mereka alami³⁷, sehingga penguatan program semacam ini berpotensi mempercepat proses integrasi sosial anak pekerja migran Indonesia di Malaysia di lingkungan sekolah barunya.

Pada ranah psikologis, penguatan resiliensi melalui konseling terbukti berperan sebagai penyangga yang mampu meredam dampak negatif stres akulturatif terhadap kesehatan mental anak dengan mobilitas tinggi³⁸, sebuah temuan yang mengindikasikan bahwa intervensi konseling tidak harus selalu berupaya menghilangkan sumber stres—yang seringkali berada di luar kendali anak maupun sekolah—melainkan dapat difokuskan pada penguatan kapasitas adaptif anak itu sendiri. Pada ranah pembentukan karakter, kepercayaan diri, dan kesiapan menghadapi masa depan, pengalaman diterima dan didampingi secara suportif selama masa transisi sekolah berpotensi

³⁶Loganathan dkk., “Barriers and Facilitators,” 2023.

³⁷“Perceptions and Strategies for the Inclusion of Migrant Students,” 2026.

³⁸Jones dkk., “Stress, Mental Health,” 2023, hlm. 1093046.

membentuk fondasi kepercayaan diri yang akan terus dibawa anak pekerja migran Indonesia di Malaysia hingga tahapan kehidupan berikutnya, sementara pengalaman sebaliknya—berupa pengucilan dan ketiadaan dukungan—berisiko meninggalkan luka psikologis jangka panjang yang dapat memengaruhi keberfungsian sosial dan akademik mereka di masa mendatang.

Analisis Kritis: Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik

Menelaah keseluruhan temuan di atas, tampak sebuah paradoks mendasar dalam sistem pendidikan Malaysia terkait anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Di satu sisi, kerangka kelembagaan bimbingan dan konseling telah terbangun cukup lama dan relatif matang, dengan keberadaan GBK sebagai personel tetap di hampir setiap sekolah negeri serta dukungan riset akademik yang terus berkembang mengenai efikasi diri dan kompetensi konselor³⁹. Di sisi

lain, justru kelompok anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang secara psikososial paling membutuhkan dukungan intensif—yakni anak pengungsi dan anak migran tanpa dokumen—berada paling jauh dari jangkauan kerangka kelembagaan tersebut, karena mereka secara struktural berada di luar sistem sekolah negeri yang menaungi keberadaan GBK itu sendiri⁴⁰. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan yang tajam antara di mana kapasitas konseling profesional tersedia dan di mana kebutuhan konseling paling mendesak justru berada.

Paradoks ini mengindikasikan bahwa penguatan layanan konseling pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia tidak dapat semata mengandalkan perluasan kapasitas GBK di sekolah negeri, melainkan memerlukan terobosan kelembagaan yang menjangkau ruang di luar sistem sekolah formal, misalnya melalui skema penempatan konselor

³⁹Ooi, Wan Jaafar, dan Crosling, "Malaysian School Counselor's Self-Efficacy," 2021, hlm. 749225; Lee, Zainudin, dan Kamarudin, "Counselling Self-Efficacy," 2025; Chow dkk.,

"Strengthening the Mental Health Literacy," 2024.

⁴⁰Loganathan dkk., "Undocumented," 2022, hlm. e0263404; Loganathan dkk., "Barriers and Facilitators," 2023.

keliling (outreach counselor) yang secara berkala mengunjungi pusat pembelajaran alternatif, atau melalui kemitraan formal antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan organisasi masyarakat sipil penyelenggara pusat pembelajaran tersebut. Tanpa terobosan semacam ini, kemajuan riset dan kebijakan konseling di Malaysia berisiko terus berputar pada populasi peserta didik yang sudah relatif terlayani, sementara kelompok anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang paling rentan tetap berada di luar radar kebijakan.

Analisis ini juga menyingkap bahwa persoalan bahasa, budaya, dan psikologis yang dialami anak pekerja migran Indonesia di Malaysia sesungguhnya saling memperkuat satu sama lain dalam pola yang bersifat siklis. Hambatan bahasa menghambat partisipasi sosial, minimnya partisipasi sosial memperbesar risiko eksklusi dan perundungan, pengalaman eksklusi tersebut memperberat stres akulturatif dan menurunkan motivasi belajar, sementara turunnya motivasi belajar pada

gilirannya semakin mempersulit penguasaan bahasa dan materi akademik. Siklus yang saling mengunci ini menegaskan bahwa intervensi konseling yang efektif tidak dapat hanya menasar satu titik dalam siklus tersebut, melainkan perlu dirancang sebagai intervensi multititik yang menyentuh aspek bahasa, sosial, dan psikologis secara simultan.

Pada akhirnya, seluruh implikasi tersebut bermuara pada satu benang merah: anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang memperoleh dukungan konseling pendidikan yang memadai memiliki peluang jauh lebih besar untuk tumbuh menjadi individu yang tangguh secara psikologis, kompeten secara sosial lintas budaya, dan siap menghadapi berbagai tantangan hidup di masa mendatang, terlepas dari status kewarganegaraan atau latar belakang migrasi yang mereka bawa. Sebaliknya, ketiadaan dukungan tersebut tidak hanya merugikan anak yang bersangkutan secara individual, tetapi juga berpotensi menimbulkan biaya

sosial jangka panjang bagi masyarakat Malaysia secara keseluruhan, mengingat generasi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang tumbuh dengan pengalaman eksklusi dan trauma yang tidak tertangani berisiko mewariskan pola kerentanan psikososial yang sama pada generasi berikutnya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu adanya kebijakan afirmatif yang secara eksplisit mengintegrasikan layanan konseling multikultural ke dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal yang diakses anak pekerja migran Indonesia di Malaysia, termasuk pusat pembelajaran alternatif yang selama ini berada di luar cakupan kebijakan negara. Kedua, program pengembangan profesional bagi konselor sekolah perlu diperkaya dengan modul khusus mengenai kompetensi lintas budaya, trauma migrasi, dan strategi komunikasi

dengan keluarga migran, sebagaimana dapat diadaptasi dari model pelatihan yang telah terbukti efektif seperti modul MDAS. Ketiga, pemanfaatan teknologi konseling jarak jauh perlu diperluas secara strategis untuk menjangkau anak pekerja migran Indonesia di Malaysia di wilayah dan institusi yang tidak memiliki tenaga konselor tetap, dengan tetap memperhatikan kesiapan efikasi diri konselor terhadap adopsi teknologi tersebut. Keempat, kolaborasi lintas sektor antara sekolah, keluarga migran, pemerintah, konsulat negara asal, dan organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat secara sistematis, bukan bersifat ad hoc, guna memastikan keberlanjutan dukungan bagi kesejahteraan psikologis dan masa depan pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan kajian empiris langsung di lapangan, baik melalui pendekatan kuantitatif berskala besar maupun studi kualitatif mendalam, guna menggali secara lebih spesifik pengalaman anak

pekerja migran Indonesia di Malaysia dan konselor sekolah dalam konteks layanan konseling multikultural di Malaysia. Kajian mendatang juga perlu mempertimbangkan perbandingan efektivitas model konseling antara sekolah internasional, sekolah kebangsaan, dan pusat pembelajaran alternatif, guna merumuskan model layanan yang benar-benar kontekstual dan dapat diterapkan secara berkelanjutan di seluruh lapisan sistem pendidikan yang melayani anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah Altarawneh, A. M., & Awwad Alomoush, R. A. (2022). The reality of e-counseling services in the light of digital learning from the point of view of teachers in Jordan. *Education and Information Technologies*, 27(9), 12773–12792. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11102-8>
- Abdillah, H., Setyosari, P., Lasan, B., & Muslihati, M. (2020). The acceptance of school counselor in the use of ICT during school from home in the Covid-19 era. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 8(4),

1569–1582.

<https://doi.org/10.17478/jegys.804939>

American School Counselor Association. (2019). The school counselor and cultural diversity [Position statement]. <https://www.schoolcounselor.org/Standards-Positions/Position-Statements/ASCA-Position-Statements/The-School-Counselor-and-Cultural-Diversity>

American School Counselor Association. (2022). Telecounseling is gaining momentum. *ASCA School Counselor Magazine*. <https://www.schoolcounselor.org/Magazines/May-June-2022/Telecounseling-is-Gaining-Momentum>

Chow, S. K., Hashim, A. H., Kaur, M., Azhar, F. L., Anuar, A., Idris, N., Hii, W. S. S., & Ng, C. G. (2024). Strengthening the mental health literacy and self-efficacy of school counsellors using "MDAS" module: A pilot project in Malaysia. *SAGE Open Medicine*. <https://doi.org/10.1177/20556365241279331>

Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) & UNICEF Malaysia. (2022). Left far behind: The impact of COVID-19 on access to education and healthcare for refugee and asylum-seeking children in Peninsular Malaysia. <https://www.unicef.org/malaysia>

- [/press-releases/ideas-unicef-refugee-asylum-seeking-childrens-rights](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263404)
- Jones, E. E., Reed, M., Meyer, A. H., Gaab, J., & Ooi, Y. P. (2023). Stress, mental health and sociocultural adjustment in third culture kids: Exploring the mediating roles of resilience and family functioning. *Frontiers in Psychology*, 14, 1093046. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1093046>
- Lee, W. R., Zainudin, Z. N., & Kamarudin, E. M. E. (2025). Counselling self-efficacy as a mediator between computer self-efficacy and attitudes toward tele-mental health among school counsellors in Malaysia. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0335955>
- Loganathan, T., Chan, Z. X., Hassan, F., Kunpeuk, W., Suphanchaimat, R., Yi, H., & Majid, H. A. (2021). Education for non-citizen children in Malaysia during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. *PLOS ONE*, 16(12), e0259546. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259546>
- Loganathan, T., Chan, Z. X., Hassan, F., Ong, Z. L., & Majid, H. A. (2022). Undocumented: An examination of legal identity and education provision for children in Malaysia. *PLOS ONE*, 17(2), e0263404. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263404>
- Loganathan, T., Chan, Z. X., Hassan, F., Ong, Z. L., & Majid, H. A. (2023). Barriers and facilitators to education access for marginalised non-citizen children in Malaysia: A qualitative study. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286793>
- Medarić, Z., Gornik, B., & Sedmak, M. (2022). What about the family? The role and meaning of family in the integration of migrant children: Evidence from Slovenian schools. *Frontiers in Education*, 7, 1003759. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1003759>
- Melnikova, J. (2022). Migrant parents at high school: Exploring new opportunities for involvement. *Frontiers in Education*, 7, 979399. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.979399>
- Mollen, D., & Ridley, C. R. (2021). Rethinking multicultural counseling competence: An introduction to the major contribution. *The Counseling Psychologist*, 49(4), 490–503. <https://doi.org/10.1177/0011000020986543>
- O'Hara, C., et al. (2021). Multicultural competence in counseling research: The cornerstone of scholarship. *Journal of Counseling & Development*, 99(2). <https://doi.org/10.1002/jcad.12367>

- Ooi, P. B., Wan Jaafar, W. M., & Crosling, G. (2021). Malaysian school counselor's self-efficacy: The key roles of supervisor support for training, mastery experience, and access to training. *Frontiers in Psychology*, 12, 749225. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.749225>
- Ridley, C. R., Sahu, A., Console, K., Surya, S., Tran, V., Xie, S., & Yin, C. (2021). The process model of multicultural counseling competence. *The Counseling Psychologist*, 49(4), 504–555. <https://doi.org/10.1177/0011000021992339>
- ScienceDirect. (2026). Perceptions and strategies for the inclusion of migrant students: A systematic review. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035526000716>
- U.S. Committee for Refugees and Immigrants (Refugees.org). (2024). International Day Against Violence & Bullying at School. <https://refugees.org/international-day-against-violence-bullying-at-school/>
- UNICEF Malaysia. (2024). World Refugee Day: UNICEF's statement on access to education for refugee and stateless children. <https://malaysia.un.org/en/272114-worldrefugeeday-unicef%E2%80%99s-statement-access-education-refugee-and-stateless-children>
- Yulianto, M. I., Mahardhani, A. J., Sulton, S., & Majid, I. A. (2023). The role of the government of Indonesia in fighting for recognition and the right to education for children of Indonesia migrant workers in Malaysia. *Jurnal Public Policy*, 9(3), 159–163. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i3.7059>